

## PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Asima Sihombing<sup>1</sup>, Tuahman Sipayung<sup>2</sup>, Sarintan E Damanik<sup>3</sup>, Pinondang Nainggolan<sup>4</sup>

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan terhadap Penapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun. Metode penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, observasi yang digunakan (N) = 144. Hasil penelitian diperoleh pengaruh yang signifikan dan positif  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , terhadap Y. Simpulan variabel infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka pemerintah sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka diperlukan kebijakan - kebijakan yang dapat mendorong agar infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat.

**Kata Kunci** : Infrastruktur, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Simalungun

### ABSTRACT

*The aim of the research is to analyze the influence of road infrastructure, agriculture and health on the Regional Original Income in Simalungun Regency. The research method uses multiple linear regression analysis, the observations used (N) = 144. The results of the study obtained a significant and positive effect of  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  on Y. Conclusion the variables of road infrastructure, agriculture and health have a positive influence on Regional Original Income. The government encourages the performance of economic growth in a region, so the government should pay special attention to the development of road, agriculture and health infrastructure to achieve quality and sustainable economic growth, policies are needed that can encourage road, agriculture and health infrastructure to help increase growth the economy is also felt by the community*

*Keywords: Infrastructure, PAD, Economic Growth, Simalungun*

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan - perubahan kearah keadaan yang lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat terpisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi



selanjutnya. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Konektivitas infrastruktur wilayah dan antar wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki program dalam bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.

Kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan. Kesehatan merupakan aksesibilitas yang terjangkau atau tidaknya dalam kehidupan masyarakat dan infrastruktur kesehatan sebaiknya harus menyentuh masyarakat luas di pedesaan maupun perkotaan. Seperti yang kita ketahui tidak semua penduduk tinggal di daerah perkotaan, kebanyakan masih tinggal di pedesaan yang mayoritas infrastrukturnya berada di perkotaan. Dan tentu juga mengenai tersedianya tenaga pelayan kesehatan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan.

Infrastruktur pertanian merupakan sektor pendukung dalam berbagai kegiatan perekonomian termasuk pertanian. Salah satu strategi pemerintah adalah dengan melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian. Ketersediaan infrastruktur dalam bidang pertanian yang memadai, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada tinggi rendahnya ongkos produksi dan distribusi komoditas pertanian. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar aliran barang dan jasa pertanian. Sebaliknya kondisi infrastruktur pertanian buruk dapat menyebabkan membengkaknya biaya produksi dan distribusi, sehingga menyebabkan produk - produk pertanian sulit bersaing di pasar.

Kabupaten Simalungun memiliki permasalahan infrastruktur jalan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan di yakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Banyaknya program pembangunan pada berbagai bidang telah dilakukan, tetapi masih banyak daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek. Salah satu ketertinggalan tersebut adalah minimnya akses warga desa terhadap sarana penunjang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan umumnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sangat rendah bahkan stagnasi. Daerah - daerah yang selama ini pembangunan infrastruktur daerah cukup rendah di beberapa kecamatan. Hal ini ditandai dengan kondisi masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain karena aksesibilitas jalan yang kurang memadai. Seharusnya pemerintah Kabupten Simalungun memiliki prioritas yang harus dibangun sehingga kontribusi retribusi jalan sangat minim.

Infrastruktur pertanian memiliki kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Simalungun adalah masih rendahnya alokasi belanja pemerintah dan nilai realisasi investasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Di satu pihak para petani dituntut untuk memproduksi hasil pertanian yang banyak, berkualitas dan berdaya jual tinggi.

Pengembangan sistem pelayanan kesehatan terhadap ibu, anak dan masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesehatan namun di Kabupaten Simalungun dalam infrastruktur kesehatan masih rendah hal ini ditandai dengan jumlah poskesdes, sumberdaya manusia yang masih rendah serta sarana prasarana yang masih minim. Oleh sebab itu pemerintah harus memastikan bahwa penduduk desa memiliki fasilitas kesehatan menuju pusat pelayanan kesehatan (puskesmas).



Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan penerimaan daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupten Simalungun

Pendapatan Asli Daerah terutama retribusi di Kabupaten Simalungun masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka PAD masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yaitu untuk pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sumber penerimaan yang diterima masih rendah, hal ini dilihat dari target PAD yang telah ditetapkan masih jauh dari target PAD.

Untuk itu pemerintah harus tetap menyelesaikan tanggungjawab bekerjasama dengan masyarakat, karena hal tersebut akan menjadi salah satu penghambat jalan pembangunan. Dengan adanya permasalahan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan serta PAD yang terjadi pada di Kabupaten Simalungun, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian, dan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi linier berganda ini dipilih karena variabel terikat dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas atau variabel penjelas secara simultan. Metode analisis dibutuhkan untuk memecahkan perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Metode analisis akan berisikan alat yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis apakah dapat diterima atau ditolak nantinya berdasarkan kesesuaian dengan hasil yang diperoleh. Regresi linier berganda menggunakan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana Y adalah Pendapatan Asli Daerah,  $X_1$  adalah Pembangunan infrastruktur jalan desa,  $X_2$  adalah Infrastruktur pertanian, dan  $X_3$  adalah Infrastruktur kesehatan.

### **Pengujian Hipotesis**

Uji F (Uji Serempak). Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan diuji pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  (5%).

Kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut: (1)  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ ; dan (2)  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima) jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ .  $H_0$ :  $b_1, b_2, b_3 = 0$  Artinya pembangunan infrasturktur jalan, pertanian dan kesehatan secara serempak tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten



Simalungun; dan  $H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$  Artinya pembangunan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan secara serempak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun

Uji t (uji parsial). Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu pembangunan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun

Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut: (A) Pembangunan infrastruktur jalan: (1)  $H_0=0$ . Pembangunan infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun; (2)  $H_0 \neq 0$ . Pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun. (B) Infrastruktur pertanian: (1)  $H_0 = 0$ . Infrastruktur pertanian tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun : (2)  $H_0 \neq 0$ . Infrastruktur pertanian berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun. (C) Infrastruktur kesehatan: (1)  $H_0 = 0$ . Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun; (2)  $H_0 \neq 0$ . Infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun.

Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji statistik regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20.

Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov - Smirnov Jika angka signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel lebih kecil dari alpha 5%, maka dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas, sedangkan sebaliknya jika angka signifikansi di dalam tabel lebih besar dari alpha 5% maka data sudah memenuhi asumsi normalitas (Sugiono, 2005)

Cara lain yang sering digunakan adalah dengan melihat tampilan grafik histogram yang memberikan pola distribusi normal karena meyebar secara merata ke kiri dan kekanan. Atau dapat juga kita lihat dari grafik Normal P - P plot. Jika Grafik Normal Plot menunjukkan bahwa titik - titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas. Dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel *independent* yang memiliki kemiripan dengan variabel *independent* lain dalam satu model yang dapat menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara variabel *independent* tersebut.

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya linier atau korelasi yang tinggi antara masing - masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Masalah multikolinearitas tidak dijumpai pada regresi sederhana karena dalam regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel independen saja.

Pengujian multikolinieritas pada usulan penelitian ini dilakukan dengan melihat *collinarity statistic* dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel



bebas. Multikolinieritas terjadi apabila (1) nilai *tolerance* ( $Tolerance < 0.10$ ) dan (2) *Variance inflation faktor* ( $VIF > 10$ ).

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama.

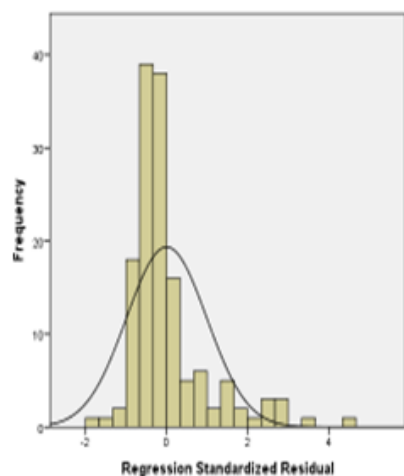
Uji Autokorelasi. Uji autokorelasi pada umumnya dipakai untuk menguji data yang bersifat time series atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu salah satunya adalah laporan keuangan.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji autokorelasi Durbin Watson (DW test). Uji Durbin Watson digunakan dengan dasar : Jika  $d$  (Durbin Watson) lebih kecil dari  $d_l$  atau lebih besar dari  $(4-d_l)$  maka terdapat autokorelasi Jika  $d$  (Durbin Watson) terletak antara  $d_u$  (durbin upper) dan  $(4-d_u)$  maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

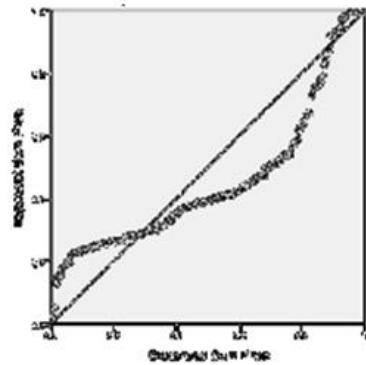
Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tampilan grafik Histogram dan Grafik P - P Plot. Untuk tampilan grafik histogram.



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Grafik di atas memberikan pola distribusi normal karena menyebar secara merata ke kiri dan ke kanan hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi uji normalitas.

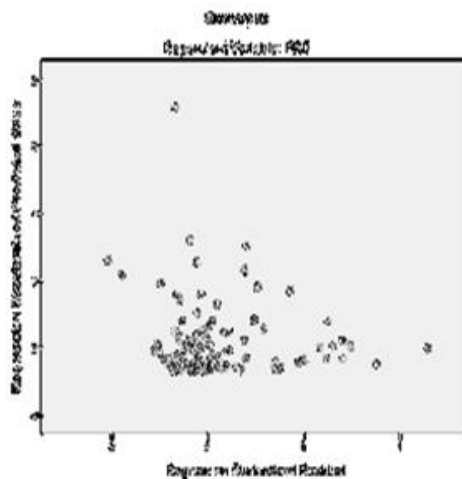
Uji Multikolonierisitas. Multiko linieritas terjadi jika nilai toleransi < 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF > 10), VIF < 10 terbebas dari multikolonierisitas. Distribusi residual bergerak (menyebar) disekitar garis diagonal



**Gambar 2. Multikolonierisitas**

Terlihat nilai VIF untuk variabel infrastrukturjalan 1,184, pertanian 1,193 dan kesehatan 1.015 sedangkan nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0.10 yaitu 0,845, 0,838 dan 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas

Uji Heteroskedastisitas. Berdasarkan Gambar berikut di bawah menunjukkan bahwa titik - titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat unsur heteroskedastisitas



**Gambar 3. Uji Heterokedastisitas**

Uji Autokorelasi. Berdasarkan *output* model *summary* di atas diketahui nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,910. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k : n) adapun jumlah variabel independen adalah 3 jumlah sampel 144 maka 3 : 144. Maka ditemukan dL sebesar 1.6854 nilai dU sebesar 1.7704 (tabel terlampir) dan kurang dari 4 – 1.7704 = 2.2296, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat gejala autokorelasi dengan demikian maka analisis regresi linier

berganda untuk uji hipotesis penelitian dapat dilanjutkan

Uji Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian regresi linier berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 1. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3947619118.851	574832255.677		6.867	0.000
Infrastruktur jalan	43.714	10.191	0.306	4.289	0.000
Infrastruktur Pertanian	71.554	31.155	0.165	2.297	0.023
Infrastruktur Kesehatan	1.325	0.181	0.483	7.304	0.000

Dari tabel diatas hasil persamaan regresi linier berganda :

$$\hat{Y} = 3947619118,851 + 43,714X_1 + 71,554X_2 + 1,325 X_3$$

Persamaan regresi di atas mempunyai arti bahwa variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  berpengaruh positif terhadap  $Y$ . Koefisien regresi  $X_1$  yaitu  $b_1 = 43,714$  artinya apabila  $X_1$  dinaikkan sebesar satu satuan maka diharapkan  $Y$  akan meningkat sebesar 43,714 satuan dengan asumsi  $X_2$ ,  $X_3$  konstan. Koefisien regresi  $X_2$  yaitu  $b_2 = 71,554$  artinya apabila  $X_2$  dinaikkan satu satuan diharapkan  $Y$  meningkat sebesar 71,554 satuan dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_3$  konstan. Koefisien regresi  $X_3$  yaitu  $b_3 = 1,325$  artinya apabila  $X_3$  dinaikkan satu satuan diharapkan  $Y$  meningkat sebesar 1,325 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$  konstan

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap  $Y$ , maka dibandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Tabel menunjukkan  $t_{hitung}$  variabel  $X_1$  mempunyai  $t_{hitung} = 4,289$  sedangkan  $t_{tabel} = 1,656$  ternyata  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $4,289 > 1,656$ ) atau tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0 \neq 0$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan  $X_1$  terhadap  $Y$ . Variabel  $X_2$  mempunyai  $t_{hitung} = 2,297$  sedangkan  $t_{tabel} = 1,656$ . Ternyata  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $2,297 > 1,656$  atau tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0 \neq 0$  artinya  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap  $Y$ . Variabel  $X_3$  mempunyai  $t_{hitung} = 7,304$  sedangkan  $t_{tabel} = 1,656$ . Ternyata  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $7,304 > 1,656$  atau tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0 \neq 0$  artinya  $X_3$  berpengaruh signifikan terhadap  $Y$ .

**Uji F.** Untuk mengetahui pengaruh bersama - sama  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  terhadap  $Y$  dilakukan uji F yang hasilnya seperti pada tabel berikut

**Tabel 2. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	S
Regression	24735813378277 57500000.000	3	82452711260925 2600000.000	30.803	.000b
Residual	3747462392459260000000.0 00	140	26767588517566 145000.000		
Total	62210437302870 18000000.000	143			

Dari tabel di atas diperoleh  $F_{hitung} = 30,803$  sedangkan  $F_{tabel} = 3,06$  dimana  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  atau  $30,806 > 3,06$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ ,



dengan demikian dapat.

**Uji  $R^2$  (Determinasi).** Dalam regresi linier berganda dengan variabel bebas ada 3 variabel, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,385 sehingga:

$$SE = Adj R Square \times 100\% = 0,385 \times 100\% = 38,5 \%,$$

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa retribusi jalan, pertanian dan kesehatan berpengaruh sebesar 38,5 % terhadap PAD Kabupten Simalungun.

### **Pembahasan**

Infrastruktur jalan berpengaruh sebesar 12,5% terhadap PAD kabupaten Simalungun. Hal ini disebabkan oleh karena pembangunan infrastruktur jalan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala diantaranya (1) keterbatasan anggaran, dimana pembangunan infrastruktur memang memerlukan penerimaan yang cukup memadai. Pengeluaran - pengeluaran pemerintah tidak hanya pada pembangunan infrastruktur saja tetapi banyak sektor lain seperti pendidikan, penanggulangan bencana dan lain - lain. (2) Sulitnya memadukan persepsi program kegiatan OPD dengan visi dan misi Kepala daerah. Dalam mewujudkan program pemerintah yang berkualitas maka dibutuhkan disimpulkan bahwa  $H_0 \neq 0$  artinya secara bersama - sama  $X_1, X_2, X_3$  berpengaruh positif signifikan terhadap Y.

Kerjasama antara eksekutif dan legislatif

Seringkali dalam penyusunan anggaran para legislatif tidak mengetahui visi dan misi dari eksekutif sehingga kurang mengetahui prioritas - prioritas apa yang didahulukan dalam penyusunan APBD. (3) Penyusunan APBD banyak dipengaruhi oleh unsur politik. Dalam proses penyusunan anggaran program - program yang dibuat oleh pemerintah berubah - ubah hal tersebut dikarenakan terdapat unsur - unsur politik. Para legislatif yang terdiri dari beberapa *background* dan visi yang berbeda sehingga mempunyai prioritas dan pandangan tersendiri dalam menentukan berapa persen anggaran yang dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut. (4) Sistem perencanaan alokasi anggaran yang tidak tepat, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan, dengan perencanaan yang matang maka kegiatan yang diagendakan akan dapat berjalan dengan optimal.

Hal ini didukung oleh (Marsaulina, 2005) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pemerintahan daerah harus memiliki tujuan untuk mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang maju, hal tersebut dapat ditunjang dengan perbaikan infrastruktur jalan sehingga daerah tersebut memiliki kemajuan dari segi pembangunan. Kabupten Simalungun umumnya bertumpu pada sektor pertanian, perternakan, perikanan, perdagangan, sektor jalan : (a). pembangunan jalan, (b). peningkatan/perbaikan infrastruktur jalan dan (c). Pembangunan infrastruktur jalan.

Infrastruktur pertanian berpengaruh sebesar 10,8%. Penyebab rendahnya infrastruktur pertanian di Kabupaten Simalungun dan tertinggal adalah: (a) infrastruktur pertanian yang terabaikan, (b) organisasi tani kurang berfungsi seperti GAPOKTAN (3) akses lembaga keuangan rendah (d) akses pasar lemah (e) informasi yang diperoleh petani rendah dan selalu





berpdoman pada pengalaman. Hal ini di dukung oleh (Triwibowo et al, 2011), suatu daerah dapat dikatakan tahan pangan kalau mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, kalau tidak cukup, dikhawatirkan terjadi kerawanan pangan, untuk itu sebaiknya pemerintah mengutamakan infrastruktur pertanian

Infrastruktur kesehatan berpengaruh sebesar 23,8. Dalam pembangunan infrastruktur kesehatan dipengaruhi keterbatasan anggaran, yang dimana pembangunan infrastruktur memang memerlukan penerimaan yang cukup memadai. Kabupaten Simalungun dalam beberapa tahun ini banyak merubah daerahnya agar dapat bersaing dengan daerah lainnya yang telah maju. Dalam rancangan APBD dapat dirinci dengan sistematis seberapa besar Kabupaten Simalungun melakukan perbaikan dalam segi infrastruktur kesehatan yaitu (1) Pembangunan puskesmas, (2) program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD, (3) pengadaan sarana dan prasarana posyandu.

Pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah. Pembangunan ini merupakan upaya untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Melalui pembangunan kesehatan diharapkan setiap penduduk memiliki kemampuan hidup sehat sehingga di masa mendatang tercipta generasi penerus yang bermutu sebagai modal penting dalam pembangunan nasional

Hal ini didukung oleh (Muhammad et al, 2009) keberadaan infrastruktur sosial yaitu kesehatan juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar - benar tepat dalam program pengembangan SDM. Salah satu keberhasilan pembangunan ditandai dengan meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun apabila dimaksimalkan maka dapat dijadikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dari penerimaan tersebut dapat digunakan salah satunya untuk pembangunan daerah termasuk infrastruktur sosial ekonomi daerah.

## **KESIMPULAN**

Variabel infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel infrastruktur pertanian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel infrastruktur kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Marsaulina, 2005. Pengaruh Infrastruktur terhadap Produktivitas Ekonomi Daerah (1983 - 2002). Jakarta: FE UI.
- Adi, Priyo Hari. 2014. Dampak Pengembangan Sarana Jalan Raya Bagi Peningkatan Mutu Layanan Publik, Salatiga, Jurnal Akuntansi Sektor Publik (JAKSP).



<http://priyohari.files.wordpress.com>

- Amrullah, Taufik, 2006. Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Regional di Indonesia. Jakarta: FE UI
- Arista, Devi. 2010. Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara (Pendekatan Model Simultan)
- Bangmu. 2012. Pengertian Infrastruktur. <http://www.bangmu2.com/2012/05/>
- Depkes RI, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, Jakarta
- Domai, Tjahjanulin, 2010. Manajemen Keuangan Publik. Malang: UB Press. Elita, D. 2002. Identifikasi Sumber – sumber PAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Digilib USU
- Fauji, Z. 2017. Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Lampung: Skripsi.
- Hari, 2004. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD (Studi Kasus Kota/Kabupaten se Jawa-Bali).
- Herman, J. 2014. Implementasi Pembangunan Infratsruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah. eJournal Administrative Reform.
- Iranto, Dicky, 2006. Dampak pembangunan infrastruktur, human capital, dan keterbukaan perdagangan, terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Jakarta : FE UI.
- Jhingan, M.L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jokosiswaya, Y. 2007. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Klaten. Yogyakarta: Skripsi.
- Kamaluddin, Rustian, H. 2003. Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad, 2010. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kodoatie, Robert, J., 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Latief, Madjid A., H.dkk. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Marsaulina, 2005. Pengaruh Infrastruktur terhadap Produktivitas Ekonomi Daerah (1983 - 2002). Jakarta: FE UI.
- Nainggolan, P., Purba, E., & Marbun, J. A. (2021). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Regional Di Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Regional Planning*, 3(2), 86-96
- Nizar, A., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Purba, E. (2019). Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 108-121
- Novi Maryaningsih Dkk, 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan). Volume 17. Nomor 1. Juli 2014
- Nurcholis, Hanif. 2005 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.



- Prasetyo, Rindang Bangun dan Firdaus. Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Sarumpaet, E., Manullang, M., Silalahi, M., & Purba, J. (2023). Kesenjangan Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Indikator Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Wilayah Di Kota Sibolga. *Jurnal Regional Planning*, 5(1), 25-40
- Setiadi, Elen, 2006. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia (8 propinsi di Sumatera). Jakarta: FE UI.
- Sibarani, Mauritz, 2002. Kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (26 propinsi di Indonesia tahun 1983-1997). Jakarta: FE UI.
- Sihombing, E. I., Siregar, R. T., Silalahi, M., & Modifa, I. (2022). Kajian Revitalisasi Kawasan Pematang Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 4(1), 51-64
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susantono Dkk, 2010. *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Esensi Erlangga Group
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14-25
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnemi*, 5(1), 9-20
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Otonomi Daerah
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (157). Jakarta, Direktorat Otonomi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Mengatur Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Wahyuni, Krismanti Tri. 2009. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi Indonesia. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- World Bank. 2013. *Pembangunan Sektor Perdagangan di Indonesia*. <http://web.worldbank.org>. Diakses
- Yuwono, Triwibowo, dkk. 2011. *Pembangunan Pertanian : Membangun Kedaulatan Pangan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

